

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam 2016/ 2017



Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam

2016 / 2017

<https://batamkota.go.id>





**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Kota Batam
2016/2017**

No. Publikasi : **2171.1719**
No. Katalog BPS : **4102.002.2171**
Ukuran Buku : **21 cm x 15 cm**
Jumlah Halaman : **viii + 76**
Naskah : **Badan Pusat Statistik Kota Batam**
Cetak : **PT. Revans Jaya Abadi, Batam**

TIM PENYUSUN

Editor
Drs. Rahyudin, M.Si

Penulis
Donny Cahyo Wibowo, SST, M.Si
Ema Aprilia Fitriani, SST

Gambar Kulit
Aditya Sangaji, SST



Kata Pengantar



Penyusunan “INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BATAM 2016/2017” merupakan salah satu kewajiban akhir BPS Kota Batam yang harus dibuat untuk melengkapi kumpulan publikasi pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kota Batam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016 yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya beli penduduk.

Publikasi ini berisi penjelasan beberapa aspek yang berkaitan dengan IPM dan hasil perhitungan IPM Kota Batam beserta komponennya, sekaligus perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau.

Dengan selesainya publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam 2016/2017” ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Segala kritik dan saran bagi penyempurnaan selanjutnya sangat diharapkan.

Batam, November 2017

Kepala BPS Kota Batam



Rahyudin



<https://batamkota.bps.go.id>

Daftar Isi



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia ..	3
BAB 2 KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA	7
2.1 Konsep Pembangunan Manusia	7
2.2 Indikator Pembangunan Manusia: Alat Ukur Pencapaian Pembangunan	12
2.2.1 Indikator Komposit Utama: IPM ...	15
2.2.2 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia	17
BAB 3 METODOLOGI	21
3.1 Perubahan Metode IPM	21
3.1.1 Metode Lama IPM	22
3.2.2 Metode Baru IPM	24
3.2 Sumber Data	27
3.3 Teknik Penghitungan	28
3.4 Penilaian Kinerja	34
BAB 4 CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	37
4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam	38
4.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam	40
4.3 Pertumbuhan IPM	46
BAB 5 UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA	49
5.1 Kependudukan	50
5.2 Perekonomian	54
5.2.1 Struktur Perekonomian	54
5.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	57
5.2.3 PDRB per Kapita	61



5.3	Pendidikan	62
5.3.1	Sarana Pendidikan, Guru, dan Murid	62
5.3.2	Angka Partisipasi	64
5.3.3	Pendidikan yang Ditamatkan	66
5.4	Kesehatan	67
5.4.1	Sarana Kesehatan	68
5.4.2	Penolong Persalinan	70
5.5	Ketenagakerjaan	71
5.6	Perumahan	73

BAB 6 PENUTUP **75**

<https://batamkota.bps.go.id>

Daftar Tabel



Tabel 2.1	Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia	19
Tabel 3.1	Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran) Komponen IPM Metode Lama	23
Tabel 3.2	Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran) Komponen IPM Metode Baru	27
Tabel 3.3	Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	31
Tabel 3.4	Share Kelompok Komoditas terhadap Total Konsumsi	34
Tabel 4.1	Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2012-2016 ..	40
Tabel 4.2	Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam, Tahun 2012-2016	41
Tabel 4.3	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam, Tahun 2012-2016	46
Tabel 5.1	Indikator Kependudukan Kota Batam Tahun 2015-2016	51
Tabel 5.2	Peranan Sektor-sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Batam, Tahun 2012-2016	55
Tabel 5.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2015-2016	56
Tabel 5.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2015-2016	58



Tabel 5.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha, Kota Batam: Tahun 2013-2016	59
Tabel 5.6	PDRB per Kapita Kota Batam Tahun 2013-2016	61
Tabel 5.7	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah, Kota Batam: 2016	63
Tabel 5.8	Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kota Batam Tahun 2015 dan 2016	69
Tabel 5.9	Jumlah Apotek, Pedagang Besar Farmasi, dan Toko Obat di Kota Batam Tahun 2013-2016 ...	70
Tabel 5.10	Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam Tahun 2015 dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2016	72
Tabel 5.11	Indikator Perumahan Kota Batam Tahun 2015-2016	73

Daftar Gambar



Gambar 2.1	Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	11
Gambar 3.1	Perkembangan Metodologi IPM	22
Gambar 3.2	Formula Penghitungan IPM Metode Lama ..	23
Gambar 3.3	Formula Penghitungan IPM Metode Baru ...	26
Gambar 3.4	Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP	33
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kota Batam (Metode Lama dan Metode Baru)	39
Gambar 4.2	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2016 ..	42
Gambar 4.3	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2016 ..	43
Gambar 4.4	Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2016	45
Gambar 4.5	Laju Pertumbuhan IPM Kota Batam, 2012-2016	47
Gambar 5.1	Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2016	53
Gambar 5.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2011-2016	60



Gambar 5.3	Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, Kota Batam: 2015-2016	65
Gambar 5.4	Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Batam: 2016	67
Gambar 5.5	Persentase Penolong Persalinan di Kota Batam Tahun 2016	71

<https://batamkota.bps.go.id>

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya, masih kerap dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi, tetapi kualitas manusianya masih rendah.

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Pembangunan manusia dapat dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini, UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk.

- a. Tentang penduduk: berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
- b. Untuk Penduduk: berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan ekonomi dalam negeri).
- c. Oleh penduduk: berupa upaya memperkuat (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia melalui partisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Prinsip-prinsip tersebut konsisten dengan hakekat dan strategi pembangunan manusia Indonesia yang terdapat dalam amanat GBHN 1993 serta sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “*memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”, yang secara implisit juga mengandung makna pemberdayaan penduduk.

Dalam upaya pemantauan atas pencapaian pembangunan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan suatu ukuran yang dapat menggambarkan ketiga unsur sebagai perluasan pilihan yang dicanangkan oleh UNDP. Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Indeks*).

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun, perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut, dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pendekatan pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, yaitu 'pembangunan manusia seutuhnya'. Indeks Pembangunan Manusia juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDB/PDRB per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk **mengukur keberhasilan** dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Oleh karena IPM merupakan indikator penting dan terukur dalam menggambarkan perkembangan pembangunan manusia, seringkali IPM dijadikan sebagai salah satu indikator **target pembangunan**, untuk menentukan level pembangunan di suatu wilayah. Penetapan IPM sebagai target pembangunan setidaknya akan menjadi asumsi makro yang dipilih, walaupun sebenarnya belum mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh. Namun demikian, indikator dalam IPM secara teknis dipandang mudah dipahami, valid, reliabel, dan parsimoni, serta terstandardisasi, sehingga mudah dibandingkan antarwilayah dan antarwaktu.

Satu alasan lagi akan pentingnya angka IPM, yaitu fakta bahwa IPM merupakan salah satu komponen kebutuhan fiskal daerah untuk **penghitungan DAU** (Dana Alokasi Umum) di samping komponen lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan PDRB per kapita. Dimasukkannya IPM dalam komponen kebutuhan fiskal daerah karena IPM dipandang sebagai variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, makin tinggi nilai IPM suatu daerah maka besaran DAU yang akan diterima oleh daerah akan semakin turun, karena daerah dipandang sudah lebih sejahtera.



<https://batamkota.bps.go.id>

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA



2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan manusia yang didefinisikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, dan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional pembangunan nasional Indonesia menyebutkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional sesungguhnya menempatkan manusia sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan atau menempatkan manusia sebagai titik sentral.

Pembangunan manusia memiliki hakekat yang demikian luas. Namun, setidaknya ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995).



a. Produktivitas

Penduduk harus diupayakan untuk mampu meningkatkan produktivitas dan mampu berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan pencarian nafkah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Penduduk harus dapat mengambil manfaat dari semua kesempatan yang ada dan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidupnya.

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dipastikan dapat sampai pada generasi yang akan datang. Dengan demikian, setiap generasi memperbaharui semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan.

d. Pemberdayaan

Harapan dan pilihan-pilihan lain masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan berpolitik, sosial, dan ekonomi, sampai pada kesempatan menjadi kreatif dan produktif. Pilihan lain yang saat ini berkembang secara global adalah kebebasan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat manusiawinya, dan tentunya jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut.

Paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi, dan apabila kedua faktor tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi (UNDP, 1995). Faktor pertama berupa formasi kapabilitas manusia, seperti perbaikan taraf kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Faktor lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas untuk kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana, bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

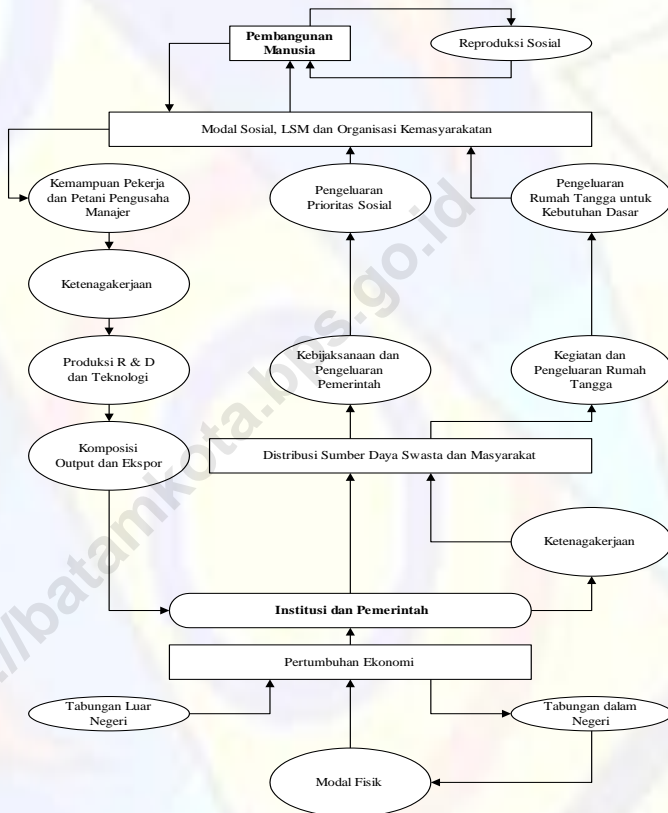
Namun demikian, pembangunan ekonomi –atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi– merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Sukar dibayangkan apabila ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai.



Akan tetapi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau daerah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang, tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur (Gambar 2.1). Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar, seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lainnya yang serupa.

Gambar 2.1
Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan
Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: UNDP (1996).

Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengkaitkan antara keduanya (UNDP,



1996). Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja, termasuk petani, pengusaha dan manajer, akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset, dan pengembangan teknologi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan, pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM, dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintahan. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai semacam katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

2.2 Indikator Pembangunan Manusia: Alat Ukur Pencapaian Pembangunan

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status, dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi dari waktu ke waktu. Adapun persyaratan dalam menetapkan sebuah indikator antara lain: *Simple*, *Measurable*, *Attributable*, *Reliable*, dan *Timely*, yang keseluruhannya dapat disingkat SMART.

a. *Simple* – sederhana

Artinya, indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam rumus penghitungannya.

b. *Measurable* – dapat diukur

Artinya, indikator yang ditetapkan dapat mempresentasikan informasinya dan jelas ukurannya. Dengan demikian, indikator tersebut dapat digunakan untuk perbandingan antara satu tempat dengan tempat lain, atau antara satu waktu dengan waktu yang lain.

c. *Attributable* – bermanfaat

Artinya, indikator yang ditetapkan harus dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

d. *Reliable* – dapat dipercaya

Artinya, indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, dan teliti.

e. *Timely* – tepat waktu

Artinya, indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan dilakukan.



Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis, peningkatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas sosial-ekonomi dasar. Adapun peningkatan daya beli, ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja. Upaya ini merupakan fungsi badan usaha swasta dengan pengaturan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Apakah fungsi-fungsi tersebut berjalan serta seberapa besar pencapaian yang telah diperoleh dalam suatu periode, diperlukan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan secara menyeluruh dari upaya pembangunan manusia. Dalam hal ini dikenal dua kategori alat ukur, yaitu (i) indikator komposit suatu indeks tunggal yang mengandung banyak dimensi pemikiran dan pengukuran berbentuk IPM, IPJ, IDJ, dan IKM, serta (ii) indikator tunggal suatu nilai statistik (rata-rata, proporsi, *ratio*, *rate*) yang hanya mengandung dimensi tunggal dari fenomena yang menjadi fokus perhatian. Secara bersamaan kedua jenis indikator tersebut (tunggal dan komposit) harus digunakan secara bersamaan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih terarah dan spesifik.

2.2.1 Indikator Komposit Utama: IPM

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia secara antar daerah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur dimaksud yang menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada tiga faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Secara umum, IPM adalah rata-rata pencapaian dalam tiga faktor.

Faktor kelangsungan hidup direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (*Life Expectancy-e*). Angka harapan hidup saat lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Faktor pengetahuan, kini digambarkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling-MYS*) dan Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*), di mana sebelumnya digambarkan oleh Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, indikator ini diasumsikan tidak akan turun. Adapun cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Peluang anak tersenut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Faktor kehidupan yang layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita tersebut dibuat konstan/ril dengan tahun dasar 2012, sedangkan penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas nonmakanan).

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama kalau disajikan tersendiri hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu daerah. Namun demikian, manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas apabila dilakukan perbandingan antarwaktu dan antardaerah, sehingga posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antarwaktu di suatu daerah dan perbandingannya dengan pencapaian daerah lain dapat dibahas.

IPM bernilai 0-100 yang semakin tinggi menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. Untuk melihat capaian tersebut, IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah,
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang,
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi,
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi.

2.2.2 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia

Permasalahan di pelbagai aspek tidak dapat digambarkan oleh indikator komposit, sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan terfokus perlu dilengkapi dengan indikator tunggal (input, proses, output, dan *outcome*) dari setiap aspek kehidupan maupun sektor pembangunan. Dengan indikator tunggal, besarnya permasalahan dapat diketahui, misalnya di tingkat perencanaan tentang kelompok sasaran dan investasi (indikator input), di tingkat implementasi tentang partisipasi kelompok sasaran dalam program (indikator proses), monitoring tentang hasil dan manfaat program (indikator output dan *outcome*). Indikator tunggal yang termasuk dalam set indikator pembangunan manusia merupakan indikator yang relevan kaitannya terhadap pencapaian pembangunan manusia, seperti yang tercermin oleh IPM, atau ukuran deprivation (keterbelakangan) manusia dalam lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Pemberdayaan merupakan salah satu isu pokok pembangunan manusia yang secara praktis meliputi (i) pertumbuhan ekonomi dengan isu strategis kesempatan kerja, (ii) peningkatan kapasitas dasar dengan isu strategis peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, penurunan laju pertumbuhan penduduk alami, (iii) pengurangan penduduk miskin. Pelbagai indikator tunggal dapat diidentifikasi yang dapat menunjukkan adanya kemajuan dalam isu tersebut karena intervensi pemerintah. Indikator tersebut sedapat mungkin dapat digunakan untuk menunjukkan sebagai faktor-faktor penyebab yang bersifat mendasar, tidak langsung, dan langsung terhadap kemajuan atau pencapaian pembangunan manusia. Sekitar 50 indikator telah diidentifikasi yang dapat diperoleh secara berkesinambungan pada tingkat kabupaten/kota, yang sebagian di antaranya disajikan pada Tabel 2.1. Indikator tersebut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia.

Tabel 2.1
Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia

No.	Indikator	Jenis	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
A Kependudukan			
1	Jumlah Penduduk	Input	SP dan Proyeksi Penduduk
2	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Setahun	Outcome	SP dan Proyeksi Penduduk
3	Rasio Jenis Kelamin	Output	SP dan Proyeksi Penduduk
4	Angka Ketergantungan	Outcome	SP dan Proyeksi Penduduk
B Ekonomi			
5	% PDRB Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa	Outcome	PDRB menurut Kab./Kota
6	PDRB per Kapita	Output	PDRB menurut Kab./Kota
7	Pertumbuhan PDRB per Kapita	Outcome	PDRB menurut Kab./Kota
C Pendidikan			
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Outcome	Susenas
9	Angka Melek Huruf	Outcome	Susenas
10	Angka Partisipasi Murni (SD, SLTP, SLTA)	Output	Susenas
11	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Input	Dinas Pendidikan
D Kesehatan			
12	Angka Kematian Bayi	Outcome	SP, SUPAS, Proyeksi
13	% Penolong Kelahiran Tenaga Medis	Output	Susenas
14	Jumlah Puskesmas per 10.000 Penduduk	Input	Dinas Kesehatan
15	Jumlah Bidan Desa	Input	Dinas Kesehatan
E Ketenagakerjaan			
16	Partisipasi Angkatan Kerja	Output	Susenas
17	Angka Pengangguran Terbuka	Outcome	Susenas
18	% Pekerja Sektor Pertanian, Industri, Jasa	Proses	Susenas
F Kemiskinan			
19	Jumlah Penduduk Miskin	Outcome	Susenas
20	% Penduduk Miskin	Outcome	Susenas
21	% Pengeluaran untuk Makanan	Outcome	Susenas
G Perumahan			
22	% Rumah Tangga dengan Lantai Tanah	Output	Susenas
23	% Rumah Tangga dengan Air Bersih	Output	Susenas



<https://batamkota.bps.go.id>

METODOLOGI

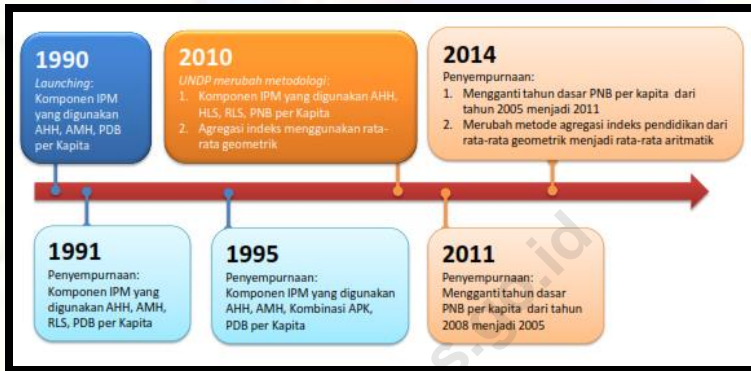


3.1 Perubahan Metode IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut direpresentasikan melalui indikator-indikatornya dengan teknik dan cara tertentu. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan UNDP (*United Nation Development Programme*). Oleh karena itu, mulai tahun 2014, penghitungan IPM dilakukan menggunakan metode baru.

Penerapan penghitungan IPM dengan metode baru sudah dilakukan UNDP sejak tahun 2010. Namun, di Indonesia penghitungan IPM dengan metode baru mulai diterapkan untuk angka IPM tahun 2014. Hal ini mempertimbangkan terkait aplikasi di Indonesia dan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap metode tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi tentunya mengikuti berjalannya waktu dan perkembangan zaman, di mana hal ini erat kaitannya dengan relevansi beberapa variabel dan kehandalan metode yang digunakan. Perkembangan perubahan metodologi penghitungan IPM ini pun juga tidak sekali ini dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Perkembangan Metodologi IPM

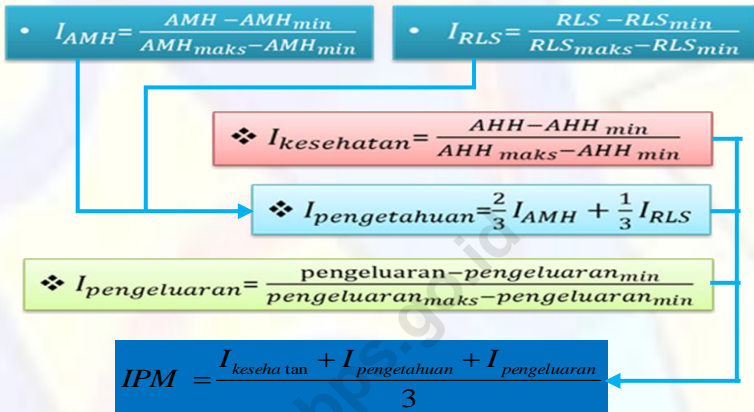


3.1.1 Metode Lama IPM

Pada prinsipnya, IPM dibangun atas dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, IPM merupakan gabungan atas indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Setiap indeks tersebut tersusun berdasarkan indikator-indikator yang merepresentasikannya.

Pada metode lama, indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), indeks pengetahuan disusun atas Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari indeks-indeks itulah diperoleh angka IPM. Dengan demikian, indeks-indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 3.2
Formula Penghitungan IPM Metode Lama



Adapun batas nilai maksimum dan minimum untuk setiap indikator adalah sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran) Komponen IPM Metode Lama

Faktor	Komponen	Batas		Sasaran
		Maks.	Min.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelangsungan Hidup	Angka harapan hidup (tahun)	85,0	25,0	60
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (persen)	100	0	100
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	15
Standar Hidup Layak	Konsumsi riil per kapita (Rp)	732.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 (1999) ^{b)}	432.720

Keterangan:

- a. Proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018, setelah disesuaikan dengan formula atkinson. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5 persen per tahun selama periode 1993-2018.
- b. Sama dengan dua kali garis kemiskinan di provinsi yang memiliki tingkat konsumsi per kapita terendah pada tahun 1990 (daerah perdesaan di Sulawesi Selatan). Untuk tahun 1999, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp 360.000,-. Penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Penambahan sebesar Rp 60.000,- didasarkan pada perbedaan antara garis kemiskinan lama dan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp 5.000,- per bulan atau Rp 60.000,- per tahun.

3.1.2 Metode Baru IPM

Ketika beberapa indikator dipandang sudah tidak tepat lagi dalam penghitungan IPM, maka dimunculkan indikator baru yang menggantikan indikator lama tersebut. Demikian pula pada beberapa cara penghitungan, juga dilakukan revisi agar lebih sesuai.

Indikator Angka Melek Huruf merupakan indikator yang sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah cukup tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf yaitu indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan masuknya angka harapan lama sekolah, berarti indikator ini akan berkombinasi dengan Indikator rata-rata lama sekolah dalam menyusun indeks pengetahuan. Perpaduan ini pun dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukkan perubahan yang terjadi.

Indikator lainnya yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita, karena pada indikator ini mencakup seluruh output yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memandang penggunaan pendapatan tersebut oleh masyarakat setempat. Indikator yang lebih menggambarkan fenomena tersebut yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Melalui PNB, potret yang akurat tentang ekonomi tahunan suatu negara dapat dianalisis dan dipelajari. PNB bisa menghitung total pendapatan dari semua warga negara dalam suatu negara. Dengan demikian, PNB memberikan gambaran yang jauh lebih realistis daripada pendapatan warga negara asing di negara itu karena lebih dapat diandalkan dan bersifat permanen. Produk Nasional Bruto per kapita dapat menunjukkan daya beli konsumen individu dari suatu negara dan perkiraan kekayaan rata-rata, upah, dan distribusi kepemilikan dalam suatu masyarakat.

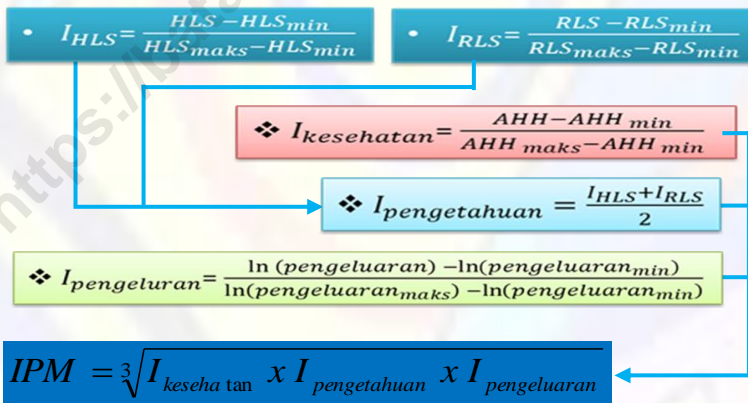
Dari segi penghitungan IPM, metode agregasi dari semua indeks penyusunnya juga mengalami perubahan. Metode agregasi pada metode lama menggunakan rata-rata aritmatik, sedangkan pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena ketiganya tingkat kepentingannya sama.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya penghitungan IPM dengan metode baru secara garis besar adalah sebagai berikut.

- a. Indeks Kesehatan dihitung dari Angka Harapan Hidup.
- b. Indeks Pengetahuan diperoleh dari rata-rata aritmatik atas indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah.
- c. Indeks Standar Hidup Layak dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
- d. IPM dihitung atas rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut (kesehatan, pengetahuan, standar hidup layak).

Jika dirumuskan, formulasinya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.3
Formula Penghitungan IPM Metode Baru



Tabel 3.2
Batas Minimum dan Batas Maksimum (Sasaran)
Komponen IPM Metode Baru

Faktor	Komponen	Batas		Sasaran
		Maks.	Min.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelangsungan Hidup	Angka harapan hidup (tahun)	85,0	20,0	65
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	0	18
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	15
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp)	26.572.352 ^{a)}	1.007.4362 ^{b)}	25.564.916

Keterangan:

Batas maksimum-minimum mengacu pada UNDP, kecuali indikator daya beli

- a. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Tolikara, Papua.
- b. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

3.2 Sumber Data

Angka IPM merupakan indeks komposit yang melibatkan beberapa indikator. Maka dari itu, dalam penghitungannya memerlukan data dari beberapa sumber pula.

Indikator Angka Harapan Hidup bersumber dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yaitu dengan menggunakan variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup, yang selanjutnya dihitung secara tidak langsung dengan paket program Mortpak.

Indikator pada dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, juga menggunakan data Susenas. Harapan lama sekolah menggunakan variabel partisipasi sekolah menurut kelompok umur yang dikoreksi dengan data siswa yang bersekolah di pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam. Untuk indikator rata-rata lama sekolah, mengkombinasikan variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Sumber data untuk indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan meliputi data Susenas Modul Konsumsi, serta data IHK (Indeks Harga Konsumen). Data IHK digunakan untuk menjadikan pengeluaran per kapita menjadi harga konstan dan berfungsi dalam penghitungan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

3.3 Teknik Penghitungan

Angka Harapan Hidup

- Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode *Trussel* dengan model *West*), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Harapan Lama Sekolah

- i. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
- ii. Menghitung jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut umur (7 tahun ke atas).
- iii. Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
- iv. Menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur, sehingga diperoleh Harapan Lama Sekolah belum terkoreksi
- v. Menghitung faktor koreksi pesantren, yaitu membagi jumlah santri sekolah dan mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas, kemudian hasilnya ditambah 1
- vi. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diperoleh dengan mengalikan Angka Harapan Sekolah belum terkoreksi dengan Faktor Koreksi Pesantren

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah santri mukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}} + 1$$

Rata-rata Lama Sekolah

- i. Menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.
- ii. Menghitung lamanya sekolah
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolah = 0.
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah di SD s.d. S1, maka:
lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah S2 atau S3, maka:
lama sekolah = konversi ijazah terakhir + 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi, tetapi tidak tamat di kelas terakhir, maka:
lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang tertentu, maka:
lama sekolah = konversi ijazah terakhir

Tabel 3.3
Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Thn)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

- iii. Menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

RLS : Rata-rata lama sekolah

Lama sekolah penduduk i : lama sekolah penduduk ke- i

n : jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

- i. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita.
- Menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
 - Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.

- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y'_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12/1000.
- ii. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan.

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012
 Y'_t : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t
 $IHK_{(t,2012)}$: IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- iii. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP).
 - Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$	Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah • V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah • Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah
-------------------------	---

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

- Menghitung paritas daya beli.

$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$	<p>p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan</p> <p>p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j</p> <p>m : jumlah komoditas</p>
---	---

Gambar 3.4
Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP

Makanan	Beras	Pepaya	+	Rumah sendiri/bebas sewa	Nonmakanan
	Tepung terigu	Minyak kelapa		Rumah kontrak	
	Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya		Rumah sewa	
	Kentang	Kelapa		Rumah dinas	
	Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir		Listrik	
	Kembung	Teh		Air PAM	
	Bandeng	Kopi		LPG	
	Mujair	Garam		Minyak tanah	
	Mas	Kecap		Lainnya(batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)	
	Lele	Penyedap masakan/vetsin		Perlengkapan mandi	
	Ikan segar lainnya	Mie instan		Barang kecantikan	
	Daging sapi	Roti manis/roti lainnya		Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	
	Daging ayam ras	Kue kering		Sabun cuci	
	Daging ayam kampung	Kue basah		Biaya RS Pemerintah	
	Telur ayam ras	Makanan gorengan		Biaya RS Swasta	
	Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak		Puskesmas/pustu	
	Susu bubuk	Nasi campur/rames		Praktek dokter/poliklinik	
	Susu bubuk bayi	Nasi goreng		SPP	
	Bayam	Nasi putih		Bensin	
	Kangkung	Lontong/ketupat sayur		Transportasi/pengangkutan umum	
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Pos dan Telekomunikasi			
Bawang merah	Sate/tongseng	Pakaian jadi laki-laki dewasa			
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi perempuan dewasa			
Cabe merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi anak-anak			
Cabe rawit	Ikan (goreng/bakar dll)	Alas kaki			
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	Minyak Pelumas			
Tempe	Makanan jadi lainnya	Meubelair			
Jeruk	Air kemasan galon	Peralatan Rumah Tangga			
Mangga	Minuman jadi lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga			
Salak	Es lainnya	Alat-alat Dapur/Makan			
Pisang ambon	Roko kretek filter				
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter				
Pisang lainnya	Rokok putih				



Tabel 3.4
Share Kelompok Komoditas terhadap Total Konsumsi

Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah item
MAKANAN	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki,tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
TOTAL	100,00	73,63	96

- iv. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

3.4 Penilaian Kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan, perlu dipahami bahwa pencapaian atau hasil pembangunan merupakan kerja kolektif seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, badan usaha swasta, organisasi massa, LSM,

serta penduduk sendiri. Oleh karena itu, mengevaluasi kinerja pembangunan tidak serta merta dapat menunjukkan pencapaian oleh pemerintah atau birokrasi semata. Namun demikian, karena peranan birokrasi pemerintahan yang sangat besar terutama dalam kedudukan dan fungsinya sebagai penyelenggara negara atau kewilayahan, maka hasil evaluasi tersebut sebagian besar dapat dialamatkan kepada pemerintah.

Untuk melihat dan mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu, digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Pertumbuhan IPM ini juga menunjukkan progres yang dicapai oleh suatu daerah dalam pencapaian pembangunan manusianya. Selama pertumbuhannya positif, berarti masih terjadi kenaikan pada nilai IPM-nya. Pertumbuhan yang positif bisa juga melambat dalam pencapaiannya. Namun demikian, progres pencapaian IPM yang digambarkan melalui pertumbuhan IPM lebih penting daripada pencapaian IPM pada peringkat tertentu, karena mengejar peringkat tidaklah mudah.



<https://batamkota.bps.go.id>

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Kota Batam bisa dikatakan sebagai jantungnya Provinsi Kepulauan Riau. Pernyataan ini tidak berlebihan jika melihat fakta dan realita yang ada. Dari sisi sosio demografi, sekitar 60 persen penduduk Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam, dengan berbagai latar belakang dan kultur yang beragam. Demikian pula dari aspek ekonomi, Kota Batam juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Kepulauan Riau. Sektor industri yang menjadi poros perekonomian utama menjadi daya tarik tersendiri. Posisi geografis yang strategis berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Kota Batam sebagai pintu masuk ketiga terbesar bagi wisatawan mancanegara. Dari kedua faktor itu pula yang mengantarkan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dengan keadaan dan potensi yang demikian, membuat Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada keadaan pembangunan di Kota Batam, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusianya. Sedikit perubahan terjadi di Batam, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keadaan Kepulauan Riau. Dengan demikian, permasalahan sosial ekonomi di Batam akan menjadi permasalahan bagi perkembangan Kepulauan Riau.

Pada sisi pembangunan manusia, peranan Kota Batam sangat menentukan pencapaian untuk Kepulauan Riau. Untuk itu, gambaran pencapaian pembangunan manusia di Kota Batam akan sangat penting untuk dicermati.

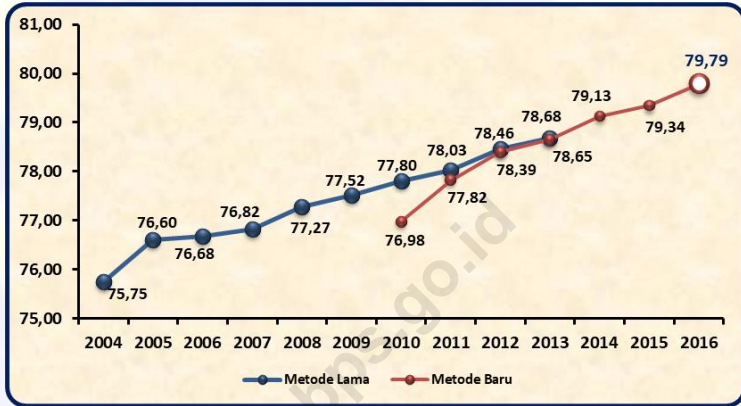
Bab 4 – Capaian Pembangunan Manusia

4.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam

Status pembangunan manusia Kota Batam, secara umum dapat digambarkan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam. Indikator inilah yang saat ini masih dapat menjadi ukuran perkembangan pembangunan manusia, yang menggabungkan kualitas pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan daya belinya. Dampak dari pembangunan manusia itu sendiri akan memberikan nilai IPM yang selalu meningkat. Nilai IPM dan peningkatannya antardaerah akan memperlihatkan sejauhmana status pembangunan manusia antardaerah, yang dalam hal ini kabupaten/kota dalam provinsi.

Sejak dihitungnya IPM pada tahun 2004 (Metode Lama), Kota Batam memiliki IPM sebesar 75,80 dan terakhir di tahun 2013 mencapai IPM sebesar 78,68. Ketika IPM dihitung ulang dengan menggunakan Metode Baru, IPM Kota Batam pada tahun 2010 sebesar 76,98 dan terakhir pada tahun 2016 IPM Kota Batam mencapai 79,79. Capaian IPM pada kedua metode sama-sama menunjukkan tren IPM yang selalu meningkat. Namun, capaian IPM dengan metode baru menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Artinya, perubahan beberapa indikator dan metode agregasi ternyata lebih bisa menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan manusia di daerah. Terlepas dari perubahan metode, capaian IPM Kota Batam pada tahun 2016 tergolong tinggi dan mendekati pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dari Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan manusia. Perkembangan IPM Kota Batam dari tahun ke tahun disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Perkembangan IPM Kota Batam
(Metode Lama dan Metode Baru)



Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu menduduki peringkat pertama. IPM kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau yang nilainya berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Riau hanya Kota Tanjungpinang. Dapat dikatakan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau banyak didongkrak oleh pencapaian IPM di Kota Batam. Bahkan hingga tahun 2012, di Kepulauan Riau masih ada daerah yang IPM-nya masih tergolong rendah ($IPM < 60$), tetapi IPM Provinsi termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi daerah lainnya yang capaian IPM-nya tinggi dan bermuatan besar, dan itulah Kota Batam. IPM Kota Batam dalam 5 (lima) tahun terakhir nilainya selalu di atas angka 78, jauh di atas IPM kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Capaian ini tentu masih harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang makin berkualitas.

Bab 4 – Capaian Pembangunan Manusia

Tabel 4.1
Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2012 - 2016

Kabupaten/Kota	IPM				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Karimun	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84
02. Bintan	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38
03. Natuna	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23
04. Lingga	59,38	60,13	60,75	61,28	62,44
05. Kep. Anambas	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30
71. BATAM	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79
72. Tanjungpinang	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77
Provinsi KEPRI	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99

Sumber: BPS Kota Batam

4.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam

IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan seiring dengan peningkatan indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Tabel 4.2
Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam,
Tahun 2012-2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil per Kapita D disesuaikan (ribu Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	72,71	12,12	10,77	16.479
2013	72,77	12,23	10,79	16.639
2014	72,80	12,62	10,80	16.735
2015	73,00	12,65	10,81	16.826
2016	73,09	12,67	11,10	16.889

Sumber: BPS Kota Batam

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup dari pertama kali dilahirkan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup Kota Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tetapi pasti. Dari angka harapan hidup sebesar 72,71 tahun pada tahun 2012, kini telah mencapai 73,09 tahun pada tahun 2016. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup ini menggambarkan bahwa memang tidak mudah untuk menaikkan indikator ini dalam kurun waktu satu tahun. Perlu upaya yang keras di bidang kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkannya, apalagi jika angka yang dicapainya sudah tinggi.

Gambar 4.2
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota,
Kepulauan Riau: 2016



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

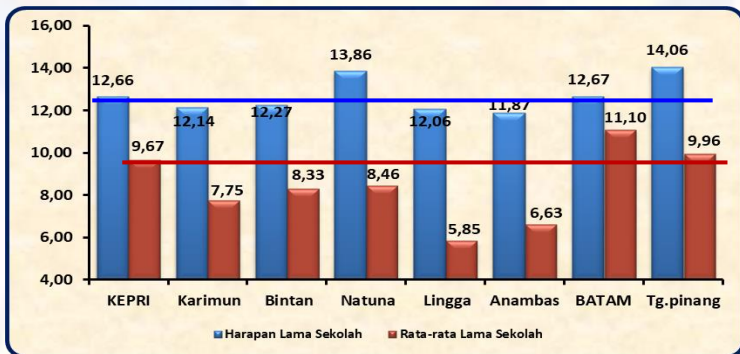
Angka harapan hidup di Kota Batam juga tergolong yang tertinggi di Kepulauan Riau, dan merupakan satu dari empat kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang angkanya di atas angka harapan hidup provinsi (Gambar 4.2). Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 69,45 tahun, dan kabupaten/kota yang angka harapan hidupnya di atasnya adalah Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun.

Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas dapat menyelesaikan sekolahnya, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk 25 tahun ke atas rata-rata menduduki bangku sekolah. Angka harapan lama sekolah berkembang dengan lambat, tetapi masih menunjukkan

peningkatan yang cukup berarti dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2012, angka harapan lama sekolah sebesar 12,12 tahun dan kini (2016) sudah mencapai 12,67 tahun. Artinya, anak-anak yang tadinya diharapkan bisa bersekolah hingga kelas 3 SLTA, kini sudah bisa diharapkan bersekolah hingga tingkat 1 di perguruan tinggi.

Adapun rata-rata lama sekolah lebih lambat lagi perkembangannya, bahkan cenderung stagnan, yaitu sebesar 10,77 tahun pada tahun 2012 dan sebesar 11,10 tahun pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Batam sampai dengan kelas 2 SLTA. Sulitnya menggeser angka rata-rata lama sekolah ini disebabkan karena penduduk yang tidak bersekolah lagi cenderung akan tetap seperti itu dan akan terus diperhitungkan selama penduduk itu masih ada. Dengan demikian, perbaikan angka rata-rata lama sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh generasi-generasi yang baru menyelesaikan masa studinya, di mana proporsinya mungkin lebih sedikit.

Gambar 4.3
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2016



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

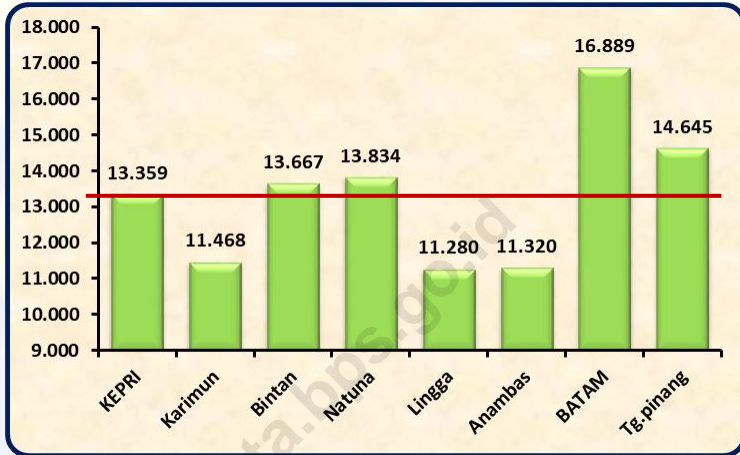
Bab 4 – Capaian Pembangunan Manusia

Untuk level Kepulauan Riau, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Batam juga berada di atas angka provinsi (Gambar 4.3). Angka harapan lama sekolah, meskipun bukan yang tertinggi di Kepulauan Riau, nilainya masih sedikit di atas angka provinsi, dan berada di bawah angka harapan lama sekolah Tanjungpinang dan Natuna. Adapun rata-rata lama sekolah, Kota Batam masih yang tertinggi di Kepulauan Riau, bersama Kota Tanjungpinang nilainya berada di atas angka provinsi yang sebesar 9,67 tahun.

Indikator komponen IPM lainnya yaitu pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian penduduk. Dalam konteks ini, satu rupiah di Batam akan memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Pada tahun 2016, pengeluaran riil per kapita dalam setahun di Kota Batam mencapai 16,889 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sekitar 63 ribu rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu, peningkatannya sekitar 410 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya daya beli.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dalam setahun untuk Kota Batam juga merupakan yang paling tinggi di Kepulauan Riau (Gambar 4.4). Bahkan selisih dengan yang tertinggi berikutnya masih sekitar lebih dari 2 jutaan. Hal ini menandakan bahwa kehidupan masyarakat Batam jauh lebih baik dan sejahtera dibandingkan masyarakat lainnya di Kepulauan Riau.

Gambar 4.4
Pengeluaran Riil per Kapita Setahun yang Disesuaikan
Menurut Kabupaten/Kota, Kepulauan Riau: 2016



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Sebelum menjadi angka IPM, indikator-indikator komponen IPM tersebut di atas dikonversi terlebih dahulu menjadi indeks komponen IPM (Tabel 4.3). Dengan diterjemahkannya dalam indeks, posisi setiap dimensi komponen IPM akan lebih jelas terlihat karena skalanya sama, yaitu dari 0 hingga 100. Kondisi terakhir (tahun 2016) menunjukkan bahwa indeks yang paling tinggi adalah indeks pengeluaran, yaitu sebesar 86,15 persen, sedangkan indeks kesehatan berada di posisi 81,68 persen. Indeks yang masih berada kisaran 70-an persen adalah indeks pengetahuan, yaitu sebesar 72,19 persen. Hal ini berarti bahwa komponen yang paling besar kontribusinya dalam menyusun angka IPM adalah komponen pengeluaran, sedangkan komponen yang masih memiliki potensi lebih besar untuk meningkat yaitu komponen pengetahuan.

Bab 4 – Capaian Pembangunan Manusia

Tabel 4.3
Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam,
Tahun 2012-2016

Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks Pengetahuan	Indeks Pengeluaran	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	81,09	69,57	85,40	78,39
2013	81,18	69,94	85,70	78,65
2014	81,23	71,06	85,87	79,13
2015	81.54	71.19	86.04	79.34
2016	81,68	72,19	86,15	79,79

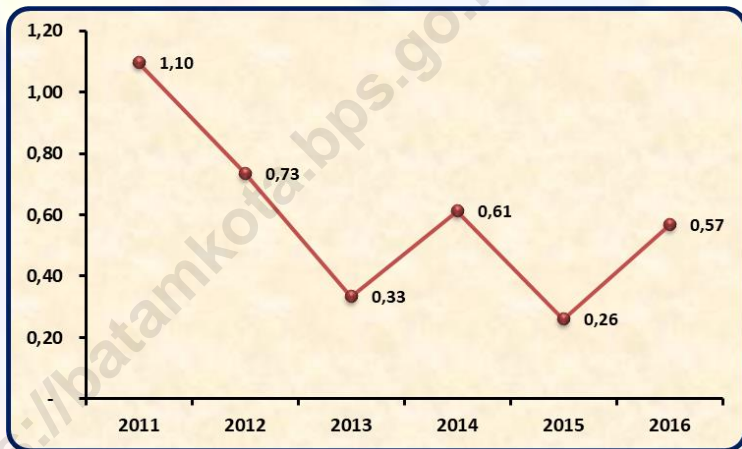
Sumber: BPS Kota Batam

4.3 Pertumbuhan IPM

Dalam menganalisis IPM, sangat penting untuk mempertimbangkan laju atau percepatan kemajuan suatu daerah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase percepatan pembangunan manusia suatu daerah untuk mencapai angka IPM ideal dikenal sebagai pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM dapat digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat percepatan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah. Selama pertumbuhan IPM positif, berarti terdapat kenaikan nilai IPM. Semakin besar pertumbuhannya, semakin cepat upaya peningkatannya. Jika angka pertumbuhan IPM lebih rendah dari tahun sebelumnya, berarti terjadi perlambatan dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Dengan

demikian, ukuran keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia pada suatu kurun waktu tidak sekedar dilihat dari posisi nilai IPM-nya, tetapi lebih tepat dilihat dari pertumbuhannya pada kurun waktu tersebut.

Gambar 4.5
Laju Pertumbuhan IPM Kota Batam,
Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kota Batam

Dari Gambar 4.5 di atas, tampak bahwa pertumbuhan IPM Kota Batam menunjukkan angka yang positif, yang berarti bahwa masih terdapat kemajuan pembangunan manusia di Kota Batam dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2011-2013, pertumbuhan IPM Kota Batam mengalami perlambatan, yaitu dari tumbuh sebesar 1,09 persen pada tahun 2011 menjadi tumbuh sebesar 0,33 persen di tahun 2013. Pada tahun 2014, pertumbuhan IPM Kota Batam kembali lebih cepat, yang mencapai 0,61 persen, lebih tinggi

Bab 4 – Capaian Pembangunan Manusia

dibandingkan tahun sebelumnya (2013). Namun, tahun berikutnya (2016), pertumbuhan IPM Kota Batam kembali melambat, yaitu sebesar 0,26 persen. Kini, pada tahun 2016, pertumbuhan IPM Kota Batam kembali menguat menjadi sebesar 0,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pembangunan manusia di Kota Batam terus berkesinambungan dengan selalu adanya peningkatan pada segenap aspek pendukungnya. Meskipun upaya pembangunan manusia sempat melambat, upaya tersebut masih bisa tumbuh positif.

UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA



Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dari pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indikator ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capability*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk



mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan dalam setahun.

Oleh karena itu, pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi oleh kajian dan analisis situasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi ketiga komponen tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Analisis situasi dilakukan melalui suatu pendekatan logis untuk menentukan indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan nilai IPM.

Bab ini khusus membahas tentang aspek kemajuan dari indikator-indikator yang mempengaruhi terhadap besaran ketiga komponen IPM. Dalam hal ini, pengaruh-pengaruh tersebut tercermin dalam indikator tunggal pembangunan manusia, yang meliputi indikator-indikator di bidang kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan perumahan.

5.1 Kependudukan

Aspek penduduk menjadi penting dalam konteks pembangunan manusia karena penduduk inilah yang menjadi target dalam pembangunan manusia. Bahkan dalam berbagai bidang pembangunan, faktor penduduk selalu diperhitungkan baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan. Maka dari itu, perkembangan jumlah penduduk beserta beberapa ukuran yang mengikutinya sangat penting untuk diamati, sehingga upaya pembangunan manusia yang dilakukan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya terhadap beberapa ukuran kependudukan yang ada.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar terkonsentrasi di Kota Batam. Sekitar 61 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Kegiatan perekonomian yang banyak terpusat di Kota Batam menjadi penyebab banyaknya penduduk yang tinggal di Batam. Hal ini juga ditandai dengan tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Batam pada tahun 2016 yang mencapai 3,99 persen. Hingga tahun 2016, jumlah penduduk Batam mencapai 1.236.399 jiwa, yang terdiri atas 631.338 orang penduduk laki-laki dan 605.061 orang penduduk perempuan. Dengan demikian, penduduk Batam bertambah sejumlah 47.414 jiwa dalam rentang waktu satu tahun terakhir.

Tabel 5.1
Indikator Kependudukan Kota Batam
Tahun 2015-2016

INDIKATOR	2015		2016	
(1)	(2)		(3)	
Penduduk	1.188.985	jiwa	1.236.399	jiwa
- Laki-laki	607.400	jiwa	631.338	Jiwa
- Perempuan	581.585	jiwa	605.061	jiwa
LPP	4,13	%	3,99	%
Sex Ratio	104,44	%	104,34	%
Migrasi Seumur Hidup	64,27	%	59,51	%
Migrasi Risen	17,27	%	11,12	%
Rasio Ketergantungan (RK)	46,21	%	46,26	%
- RK Muda	44,73	%	44,77	%
- RK Tua	1,47	%	1,49	%

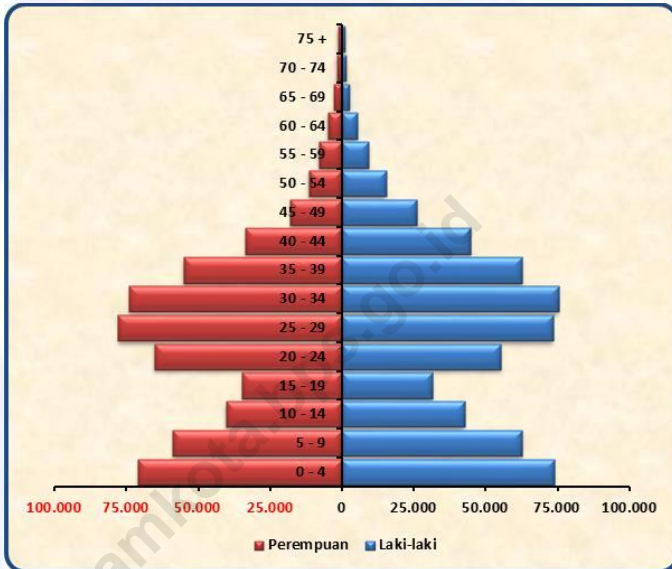
Sumber : BPS



Komposisi penduduk menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari *sex ratio* yang nilainya di atas 100, yaitu sebesar 104,34 persen, yang menjelaskan bahwa dalam setiap 100 orang perempuan, terdapat sekitar 104 orang laki-laki. Lebih banyaknya penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan bisa juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi Batam lebih cenderung menarik minat pendatang laki-laki, karena Batam memang dikenal sebagai kota industri yang menjadikannya sebagai daerah tujuan migran.

Tingkat migrasi yang tinggi juga turut mempengaruhi komposisi penduduk Kota Batam, khususnya dalam segi umur. Penduduk migran seumur hidup di Batam, atau penduduk yang lahirnya di luar Batam, mencapai 59,51 persen, sedangkan penduduk migran risen di Batam, atau penduduk yang lima tahun sebelumnya tidak tinggal di Batam, mencapai 11,12 persen. Persentase ini merupakan tertinggi di Kepulauan Riau dan termasuk tinggi secara nasional. Mayoritas migran yang datang ke Batam bertujuan untuk bekerja atau mencari kerja, sehingga pada umumnya mereka adalah tenaga usia produktif. Maka dari itu, komposisi penduduk menurut umur banyak mengelompok pada usia 20-39 tahun. Para migran usia produktif ini akan membawa dampak terhadap tingkat fertilitas, karena mereka masih tergolong dalam kategori usia subur, yang pola dan perilaku fertilitasnya bervariasi mengikuti pola dan perilaku daerah asalnya. Atas kondisi inilah maka komposisi penduduk Kota Batam tercermin dalam piramida penduduk sebagaimana Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Piramida Penduduk Kota Batam
Tahun 2016



Sumber : BPS, *Proyeksi Penduduk*

Namun demikian, besarnya penduduk usia produktif tersebut juga membawa konsekuensi semakin banyaknya penduduk yang menanggung mereka yang tergolong penduduk usia non-produktif, sehingga hal ini menjadi potensi tersendiri nantinya apabila dimanfaatkan dengan cermat. Ukuran ini tergambar dari rasio ketergantungan yang mencapai 46,26 persen, atau 10.000 penduduk usia produktif akan menanggung 4.626 penduduk usia non-produktif, di mana sebagian besar penduduk usia non-produktif tersebut merupakan penduduk muda (usia kurang dari 15 tahun). Hal ini tergambar dari rasio ketergantungan penduduk muda yang jauh lebih tinggi daripada rasio ketergantungan penduduk tua, yaitu sebesar 44,77 persen berbanding 1,49 persen.



5.2 Perekonomian

Aspek perekonomian dalam komponen IPM, meliputi komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Komponen ini secara signifikan sangat mempengaruhi perkembangan angka IPM. Komponen daya beli juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan penduduk karena menyangkut perekonomian penduduk. Maka dari itu, perlu dilihat perbandingannya dengan kondisi perekonomian secara makro.

5.2.1 Struktur Perekonomian

Perekonomian Kota Batam sangat tergantung pada sektor industri. Sektor industri mempunyai kontribusi lebih dari 50 persen (55,46 persen) dalam perekonomian Batam. Terganggunya kegiatan industri akan memberikan dampak yang sangat luas bagi perekonomian Kota Batam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam harus memperhatikan dengan sangat serius kegiatan sektor ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan kegiatan industri. Perkembangan sektor industri menuntut tersedianya infrastruktur, sehingga hal ini akan mendorong pembangunan sektor konstruksi. Tumbuhnya kedua sektor ini akan berdampak pada tumbuhnya sektor riil seperti sektor perdagangan. Maka dari itu, struktur perekonomian di Batam selanjutnya ditopang oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,47 persen dan 6,24 persen.

Tabel 5.2
Peranan Sektor-sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Batam,
Tahun 2012-2016
(Persen)

Sektor	2012	2013	2014*	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	1,14	1,07	1,05	1,00	0,99
2. Pertambangan & Pengalihan	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
3. Industri Pengolahan	55,92	56,71	56,27	56,10	55,46
4. Pengadaan Listrik & Gas	1,86	1,82	1,75	1,69	1,72
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,20	0,18	0,19	0,18	0,18
6. Konstruksi	18,71	18,71	19,02	19,34	19,47
7. Perdagangan	6,01	5,73	5,94	6,05	6,24
8. Transportasi	3,21	3,26	3,27	3,44	3,58
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,11	2,11	2,18	2,22	2,24
10. Informasi, Komunikasi	2,24	2,10	2,07	1,98	1,98
11. Jasa Keuangan	3,77	3,65	3,62	3,46	3,53
12. Real Estate	1,50	1,43	1,45	1,42	1,43
13. Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Administrasi Pemerintahan	1,07	1,07	1,09	1,09	1,12
15. Jasa Pendidikan	0,99	0,95	0,93	0,91	0,92
16. Jasa Kesehatan	0,76	0,71	0,71	0,68	0,68
17. Jasa Lainnya	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : ** Angka Sementara
 * Angka Perbaikan



Tabel 5.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,
Kota Batam: Tahun 2015-2016
(Juta Rupiah)

Sektor	2015*	2016**
(1)	(6)	(6)
1. Pertanian	1.210.296,77	1.288.942,31
2. Pertambangan & Penggalan	88.561,35	91.105,61
3. Industri Pengolahan	67.973.502,86	72.511.416,60
4. Pengadaan Listrik & Gas	2.044.267,87	2.246.811,19
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	219.516,24	236.454,73
6. Konstruksi	23.429.797,30	25.459.591,12
7. Perdagangan	7.332.143,49	8.161.094,36
8. Transportasi	4.164.321,51	4.674.682,34
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.683.980,19	2.934.734,80
10. Informasi, Komunikasi	2.394.333,57	2.583.367,16
11. Jasa Keuangan	4.192.638,72	4.611.282,24
12. Real Estate	1.718.921,63	1.867.630,80
13. Jasa Perusahaan	5.383,09	5.871,57
14. Administrasi Pemerintahan	1.318.248,09	1.470.584,04
15. Jasa Pendidikan	1.098.654,85	1.196.851,10
16. Jasa Kesehatan	824.678,99	890.987,48
17. Jasa Lainnya	469.439,76	503.361,48
Jumlah	121.168.686,28	130.734.768,94

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : ** Angka Sementara
 * Angka Perbaikan

5.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan di samping pemerataan. Pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan pertanda keberhasilan pembangunan yang harus selalu dipertahankan dan dijaga dengan kebijakan-kebijakan yang memacu pertumbuhan atau meminimalisir kendala pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi harus selalu diusahakan melalui laju pertumbuhan penduduk sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, selayaknya harus selalu memperhatikan sektor-sektor kunci (*leading sector*) dalam pertumbuhan ekonomi. *Leading sector* perekonomian Kota Batam adalah sektor industri; sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Dengan memacu pertumbuhan pada *leading sector* tersebut, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan pada sektor ekonomi yang lain. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 95,35 triliun, di mana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 90,43 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2016 sebesar 5,45 persen, yang berarti tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,83 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, yaitu tumbuh sebesar 8,10 persen, disusul oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 7,51 persen.



Tabel 5.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,
Kota Batam: Tahun 2015-2016
(Juta Rupiah)

Sektor	2015*	2016**
(1)	(6)	(6)
1. Pertanian	956.386,40	989.932,05
2. Pertambangan & Penggalian	69.986,84	70.378,77
3. Industri Pengolahan	50.207.254,47	52.526.653,49
4. Pengadaan Listrik & Gas	1.271.734,13	1.367.186,06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	181.101,36	190.727,17
6. Konstruksi	17.323.035,37	18.483.678,74
7. Perdagangan	5.760.304,08	6.159.401,92
8. Transportasi	2.767.084,59	2.936.143,47
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.056.852,83	2.182.535,91
10. Informasi, Komunikasi	2.308.321,73	2.462.979,28
11. Jasa Keuangan	3.220.531,62	3.445.772,36
12. Real Estate	1.407.200,96	1.472.910,90
13. Jasa Perusahaan	4.630,37	4.870,35
14. Administrasi Pemerintahan	970.272,11	1.048.871,18
15. Jasa Pendidikan	873.820,77	918.843,30
16. Jasa Kesehatan	686.658,62	719.024,94
17. Jasa Lainnya	362.213,03	374.890,49
Jumlah	90.427.389,28	95.354.800,38

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : ** Angka Sementara
 * Angka Perbaikan

Tabel 5.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha,
Kota Batam: Tahun 2013-2016

Sektor	2013	2014*	2015*	2016**
(1)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	2,53	5,27	3,35	3,51
2. Pertambangan & Pengalihan	0,94	0,94	0,45	0,56
3. Industri Pengolahan	7,07	6,95	6,89	4,62
4. Pengadaan Listrik & Gas	9,13	8,73	3,29	7,51
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	6,45	5,65	3,46	5,32
6. Konstruksi	8,10	8,80	8,46	6,70
7. Perdagangan	7,85	6,78	7,60	6,93
8. Transportasi	8,30	3,11	6,26	6,11
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,02	8,98	6,44	6,11
10. Informasi, Komunikasi	6,49	8,56	5,81	6,70
11. Jasa Keuangan	5,94	5,82	2,48	6,99
12. Real Estate	7,07	6,59	5,29	4,67
13. Jasa Perusahaan	6,24	5,16	4,21	5,18
14. Administrasi Pemerintahan	5,12	6,15	7,32	8,10
15. Jasa Pendidikan	6,08	5,28	4,65	5,15
16. Jasa Kesehatan	2,29	6,90	4,51	4,71
17. Jasa Lainnya	1,05	3,85	3,78	3,50
Jumlah	7,18	7,16	6,83	5,45

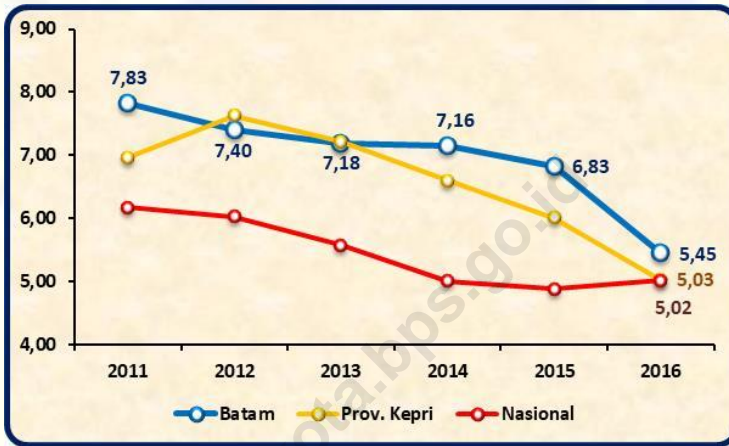
Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : ** Angka Sementara

* Angka Perbaikan



Gambar 5.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, dan Nasional
Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kota Batam

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam perlambatannya lebih kecil pada tahun 2011 hingga 2015 dibandingkan dengan keadaan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Bahkan sejak tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Batam lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian makro di Batam masih lebih baik daripada perekonomian Kepulauan Riau secara keseluruhan. Bahkan Kota Batam berperan penting dalam perekonomian di Kepulauan Riau.

5.2.3 PDRB per Kapita

PDRB merupakan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Nilai tambah tersebut diperoleh dari total output dikurangi dengan biaya antara yang dipakai dalam proses produksi. PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menjadi PDRB per kapita, yang dapat diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 5.6
PDRB Per Kapita Kota Batam
Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Uraian	2013	2014*	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB per Kapita (Juta Rp)				
- Harga Berlaku	88,31	97,95	110,69	119,43
- Harga Konstan	72,16	77,33	82,61	87,11

Sumber : BPS Kota Batam
 Keterangan : ** Angka Sementara
 * Angka Perbaikan

Berdasarkan Tabel 5.6, tampak bahwa PDRB per kapita penduduk Kota Batam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, rata-rata penduduk Batam memiliki PDRB per kapita sebesar 88,31 juta rupiah (ADHB) dan 72,16 juta rupiah (ADHK) dalam setahun. Kini, setelah empat tahun berselang, di mana perekonomian tumbuh dan penduduk pun tumbuh, PDRB per kapita menjadi sebesar



119,43 juta rupiah (ADHB) dan 87,11 juta rupiah (ADHK) dalam setahun. Hal ini berarti bahwa tingkat perekonomian mampu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga secara makro pemenuhan kebutuhan penduduk masih dapat ditingkatkan.

5.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju tingkat pendidikan, berarti akan membawa pengaruh yang positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Secara makro gambaran kemajuan bidang pendidikan tercermin dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang semakin meningkat, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Gambaran umum tentang kemajuan pencapaian pendidikan juga tercermin dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, angka partisipasi (sekolah, kasar, dan murni), dan output yang dihasilkannya (pendidikan yang ditamatkan).

5.3.1 Sarana Pendidikan, Guru, dan Murid

Akses terhadap fasilitas pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah di suatu daerah. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu faktor penting yang menunjang kemajuan di bidang pendidikan sehingga perlu kelayakan atas tersedianya sarana ataupun fasilitas pendidikan di masyarakat.

Hingga tahun 2016, jumlah bangunan sekolah di Kota Batam mencapai sebanyak 674 unit, yang terdiri atas 374 unit gedung SD, 175 unit gedung SLTP, dan 125 unit gedung SLTA, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Keberadaan sejumlah fasilitas pendidikan tersebut ditunjang dengan tenaga pengajar sebanyak 5.431 orang guru SD, 2.273 orang guru SLTP, dan 796 orang guru SLTA yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batam. Mereka akan mendidik dan membimbing peserta didik yang masing-masing berjumlah 128.486 orang murid SD, 46.173 orang murid SLTP, dan 34.826 orang murid SLTA.

Tabel 5.7
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid
Menurut Jenis Sekolah, Kota Batam: 2016

Uraian	SD	SLTP	SLTA	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah	374	175	125	674
Guru	5.431	2.273	796	8.500
Murid	128.486	46.173	34.826	209.485
Rasio Murid-Guru	24	20	44	25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh rasio murid-guru yang menjelaskan rata-rata jumlah murid yang harus ditangani oleh setiap guru. Secara umum, rasio murid-guru masih berada pada kondisi ideal, yaitu 25. Namun, jika dilihat pada setiap jenjang, rasio murid-



guru tingkat SLTA masih berada pada situasi yang kurang ideal, yaitu 44. Hal ini berarti setiap guru SLTA secara rata-rata akan menangani sebanyak 44 murid. Rasio yang terlalu besar akan menyebabkan kurang efektifnya kegiatan belajar-mengajar di kelas.

5.3.2 Angka Partisipasi

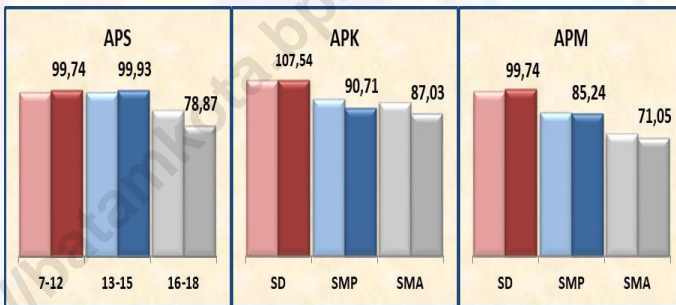
Terdapat beberapa ukuran angka partisipasi yang sering dikenal dalam dunia pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator angka partisipasi tersebut dibedakan menurut kelompok usia sekolah ataupun jenjang pendidikan.

Untuk melihat seberapa banyak anak-anak yang masih bersekolah sesuai dengan klasifikasi usia sekolahnya, dapat digunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Untuk melihat seberapa banyak jumlah anak-anak yang bersekolah pada jenjang tertentu (tanpa memperhatikan umur) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Adapun untuk melihat seberapa banyak jumlah anak-anak usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut, digunakan Angka Partisipasi Murni (APM).

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, APS Kota Batam menunjukkan bahwa terdapat sekitar 99,74 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di antara seluruh penduduk usia 7-12 tahun dan

sekitar 99,93 persen penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di antara seluruh penduduk usia 13-15 tahun tersebut. Semakin tinggi tingkatan umurnya, ternyata partisipasi sekolahnya semakin menurun. Hal ini terlihat pada APS usia 16-18 tahun yang sebesar 78,87 persen. Dari seluruh APS, hanya APS usia 16-18 yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan APS tahun sebelumnya.

Gambar 5.3
Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan,
Kota Batam: 2015-2016



Sumber: BPS Kota Batam, Susenas 2015-2016

Jika dilihat APK-nya, tampak bahwa yang terbesar adalah APK SD dan selanjutnya APK jenjang berikutnya selalu lebih rendah. Pada tahun 2016, APK SD mencapai 107,54 persen, yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 107-108 siswa SD (usia berapa saja). Adapun APK SLTP dan APK SLTA masing-masing mencapai 90,71 persen dan 87,03 persen. Hanya APK SD yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015.



Ukuran yang lebih memperhitungkan seseorang bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan usianya adalah APM. Seperti APK, nilai APM pun menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Pada tahun 2016, APM SD sebesar 99,74 persen, APM SLTP sebesar 85,24 persen, dan APM SLTA sebesar 71,05 persen. Terdapat penurunan pada capaian APM SLTP dan APM SLTA, tetapi meningkat dalam capaian APM SD.

Dari nilai APS, APK, dan APM tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi seseorang untuk bersekolah cenderung berkurang ketika memasuki jenjang SLTA. Guna menghasilkan SDM yang handal, tentunya fenomena ini harus dapat teratasi secara bertahap, walaupun sebenarnya pola seperti ini juga berlaku secara nasional.

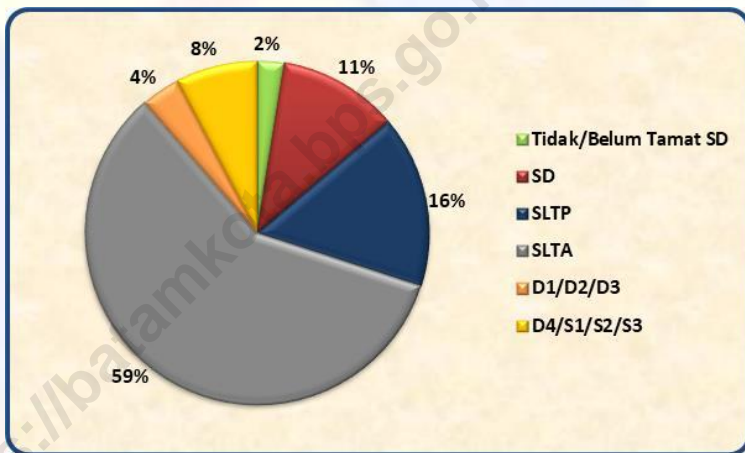
5.3.3 Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas SDM dan output yang diharapkan dapat tergambar berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin banyak penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, asumsinya kualitas SDM-nya semakin baik. Maka dari itu, persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator penting di bidang pendidikan.

Pada tahun 2016, mayoritas penduduk Batam yang berusia 15 tahun ke atas berpendidikan tamat SLTA, yaitu sebesar 59 persen. Namun, persentase yang berpendidikan tinggi baru 12 persennya, yang dirinci tamat diploma (D1/D2/D3) sebanyak 4 (empat) persen dan tamat sarjana (D4/S1/S2/S3) sebanyak 8 (delapan) persen. Yang menjadi

bagian dari permasalahan dalam hal ini yaitu masih terdapat sekitar 2 (dua) persen penduduk (usia 15 tahun ke atas) yang tidak/belum tamat SD dan sekitar 11 persen yang tamatan SD. Untuk meminimalisir permasalahan ini, program Paket A/B/C perlu lebih dikenalkan kepada masyarakat.

Gambar 5.4
Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Kota Batam: 2016



Sumber: BPS Kota Batam, Susenas 2016

5.4 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Upaya pencapaian derajat kesehatan tercermin dari ketersediaan sarana dan parasarana kesehatan,



persentase penolong persalinan oleh tenaga medis, serta sarana-sarana lainnya. Peningkatan derajat kesehatan, juga tercermin dalam IPM, melalui komponen Indeks Harapan Hidup yang semakin meningkat.

5.4.1 Sarana Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dilakukan oleh pemerintah dengan menambah jumlah sarana kesehatan. Bertambahnya sarana kesehatan tersebut akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan. Sarana kesehatan yang dimaksud dapat berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poliklinik, rumah sakit bersalin, dan polindes. Selain itu, sarana pendukung seperti apotek, pedagang besar farmasi, dan toko obat juga turut mendukung terciptanya pembangunan kesehatan di masyarakat.

Berdasarkan Tabel 5.8, secara umum jumlah sarana kesehatan bertambah. Penambahan jumlah sarana kesehatan ini karena adanya penambahan puskesmas dari semula sebanyak 17 unit menjadi 19 unit, puskesmas pembantu dari semula 57 unit menjadi 59 unit, puskesmas keliling dari semula 44 unit menjadi 48 unit, dan polindes dari semula 38 unit menjadi 42 unit. Sementara itu, jumlah sarana kesehatan yang lain kondisinya sama dengan jumlah tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya sarana kesehatan ini, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat pun turut meningkat.

Tabel 5.8
Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya
di Kota Batam Tahun 2015 dan 2016

Sarana Kesehatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Sakit	16	15
2. Puskesmas	17	19
3. Puskesmas Pembantu	57	59
4. Puskesmas Keliling	44	48
5. Poliklinik	182	182
6. Rumah Bersalin	65	65
7. Polindes	38	42
J U M L A H	419	430

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Sarana kesehatan pendukung pun secara keseluruhan juga mengalami peningkatan. Peningkatan sarana kesehatan pendukung ini disebabkan karena meningkat pesatnya jumlah apotek dari 139 unit pada tahun 2015 menjadi 162 unit pada tahun 2016 dan toko obat dari 160 unit (2015) menjadi 172 unit (2016). Sementara itu, jumlah pedagang besar farmasi justru berkurang, yaitu dari 45 unit menjadi 35 unit pada tahun 2016. Terlepas dari berkurangnya jumlah pedagang besar farmasi, secara umum penambahan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kemudahan akses untuk menyembuhkan beberapa penyakit untuk mencapai kesehatan yang diinginkan.



Tabel 5.9
Jumlah Apotek, Pedagang Besar Farmasi, dan Toko Obat
di Kota Batam Tahun 2013-2015

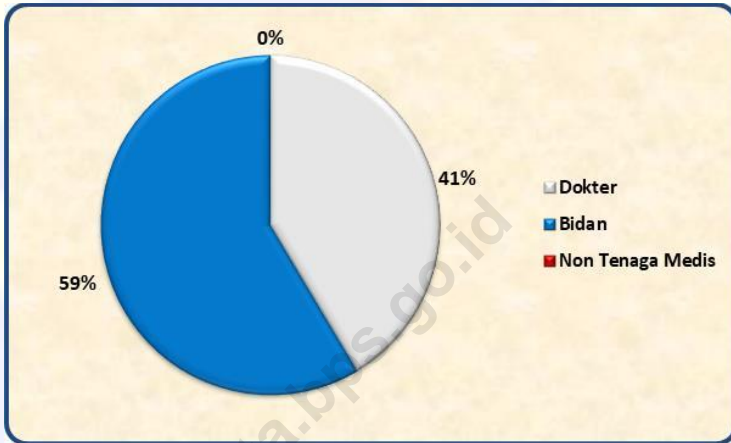
Sarana Kesehatan	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Apotek	119	148	139	162
2. Pedagang Besar Farmasi	54	46	45	35
3. Toko Obat	91	129	160	172
J U M L A H	264	323	344	369

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

5.4.2 Penolong Persalinan

Ketersediaan tenaga medis yang merata, sangat mendukung perilaku masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan persalinan. Satu hal yang menandai bahwa tingkat kesehatan masyarakat sudah lebih baik yaitu melalui indikator persentase penolong persalinan. Pada tahun 2016, persentase penolong persalinan di Kota Batam mencapai 100 persen ditolong oleh tenaga medis, baik dokter maupun bidan. Persentase persalinan yang ditolong oleh dokter sebesar 41 persen dan sebesar 59 persen persalinan ditolong oleh bidan. Tidak ada lagi persalinan yang ditolong oleh selain tenaga medis.

Gambar 5.5
Persentase Penolong Persalinan di Kota Batam
Tahun 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

5.5 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2016, statistik ketenagakerjaan kabupaten/kota tidak dapat disajikan karena tidak dilaksanakannya Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan di seluruh Nusantara. Namun, statistik ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau masih dapat disajikan karena Sakernas Semester II tetap dilanjutkan (sampel kecil/estimasi provinsi). Mengingat jumlah penduduk Kota Batam sangat mendominasi di Kepulauan Riau sehingga perubahan sedikit atas indikator di Batam akan berpengaruh signifikan pada kondisi Kepulauan Riau, penyajian Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran atas keadaan ketenagakerjaan di Kota Batam tahun 2016. Pada tahun



2016, jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Kepulauan Riau mencapai 1.412.772 orang. Di antara penduduk usia kerja tersebut, 931.435 orang termasuk dalam angkatan kerja, yang terdiri atas 859.808 orang penduduk bekerja dan 71.627 orang pengangguran. Bertambahnya jumlah pengangguran, mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2016 juga mengalami peningkatan, yaitu dari 6,20 persen menjadi 7,69 persen. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 65,07 persen menjadi 65,93 persen.

Tabel 5.10
Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam Tahun 2015 dan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2016

Indikator	Batam 2015	Kepri 2015	Kepri 2016
(1)	(2)	(3)	(3)
Penduduk Usia Kerja	827.191	1.370.889	1.412.772
Angkatan Kerja	558.038	891.988	931.435
- Bekerja	524.046	836.670	859.808
- Pengangguran	33.992	55.318	71.627
Bukan Angkatan Kerja	269.153	478.901	481.337
TPAK	67,46	65,07	65,93
TPT	6,09	6,20	7,69

Sumber: BPS, Sakernas

Dari indikator-indikator di Kepulauan Riau yang meningkat di setiap rinciannya, dan dengan melihat proporsi Batam terhadap Kepulauan Riau pada tahun 2015, setidaknya tergambar kondisi ketenagakerjaan di Kota Batam yang diduga sejalan dengan keadaan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.7 Perumahan

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga salah satunya bisa dilihat dari gambaran kondisi perumahannya, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi dan kesehatan karena rumah merupakan tempat tinggal sehari-hari di mana di dalamnya pasti terdapat berbagai aktivitas. Pada tahun 2016, di antara rumah tangga yang menempati tempat tinggal, 9,98 persen di antaranya menempati tempat tinggal dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi, secara signifikan meningkat jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Namun, banyaknya rumah kos di Batam juga turut memberikan andil terhadap pencapaian nilai pada indikator ini.

Tabel 5.11
Indikator Perumahan Kota Batam
Tahun 2015-2016

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Luas lantai < 20 m ² (%)	7,10	9,98
Luas lantai per kapita < 7,2 m ² (%)	6,04	6,80
Akses air minum layak (%)	94,13	94,71
Akses sanitasi layak (%)	85,76	86,25
Rumah tangga kumuh (%)	1,31	0,73

Sumber: BPS, Susenas

Ukuran yang lebih menjelaskan kelayakan suatu tempat tinggal yang ditempati yaitu apabila luas lantainya dibandingkan dengan jumlah penghuni tempat tinggal



tersebut. Berdasarkan data Susenas 2016, rumah tangga yang menghuni tempat tinggal dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 meter persegi adalah sekitar 6,80 persen. Persentase ini tampak sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2015.

Jika dilihat dari segi akses terhadap air minum layak dan akses terhadap sanitasi layak, terlihat adanya peningkatan yang terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 94,71 persen, sedangkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 86,25 persen. Persentase ini sudah cukup besar, mengingat di Batam masih terdapat wilayah *hinterland* yang kehidupannya masih tergantung dan dipengaruhi dengan lingkungan sekitar.

Adapun kombinasi dari ketiga indikator perumahan di atas pada daerah perkotaan, menyimpulkan bahwa di Kota Batam masih terdapat 0,73 persen rumah tangga kumuh pada tahun 2016. Proporsi rumah tangga kumuh ini jauh menurun dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 yang mencapai 1,31 persen.

PENUTUP



Pembangunan manusia memang sudah saatnya diberi perhatian yang lebih. Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, pembangunan manusia lebih menekankan pada investasi masa depan. Hasilnya memang tidak bisa langsung dirasakan, tetapi keberhasilan pembangunan manusia secara tidak langsung akan memacu pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan menghasilkan generasi yang tangguh menghadapi tantangan masa depan.

Batam, dalam menghadapi FTZ (*Free Trade Zone*), tentunya memerlukan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan sumber daya asing. Peningkatan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan, adalah modal utama dalam menghadapi era globalisasi. Jika hal tersebut diabaikan maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Batam tidak akan ada gunanya, karena tidak bisa dirasakan oleh masyarakatnya secara langsung. Lapangan kerja yang tersedia pun memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, seperti bidang IT (*Information Technology*) serta sektor finansial dan perbankan. Jika kita tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka yang akan mengisi sektor tersebut adalah tenaga kerja asing yang memang telah diakui kehandalannya. Lalu, bagaimana dengan tenaga kerja

kita? Mungkin keadaannya tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini. Tenaga kerja kita hanya sebagai pekerja “kelas bawah” dengan pendapatan/*salary* yang rendah. Adapun bagi mereka yang tidak bisa terserap di sektor formal, maka dengan sukarela mereka akan bekerja di sektor informal, dengan keterampilan yang seadanya. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa bersaing dengan dunia luar.

Nilai IPM Batam memang sudah cukup baik. Namun demikian, bukan berarti tugas Pemerintah Kota Batam berhenti sampai di sini, karena sesungguhnya hakikat dari pembangunan sendiri adalah berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada akhirnya nanti akan menciptakan masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan tangguh menghadapi perkembangan zaman, sehingga akan tercipta masyarakat yang madani, sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kota Batam, menjadikan Batam sebagai Bandar Kota Madani.



SENSUS
EKONOMI

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://batangpota.bps.go.id/>

"Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua"

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BATAM**

Jl. Raja Ali Kelana - Batam Center - Kota Batam

telp : (0778) 7433299 | fax : (0778) 7433299

e-mail : bps2171@mailhost.bps.go.id

website : <http://www.batamkota.bps.go.id>

"Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua"